

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

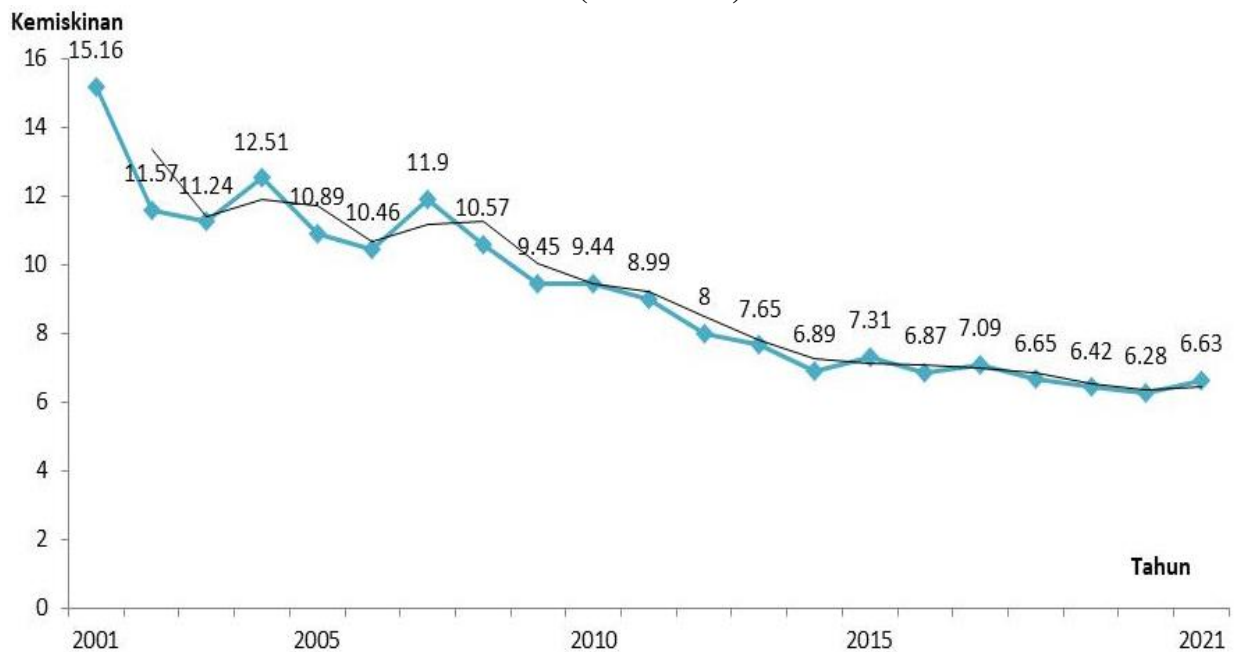
Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Christianto, 2013). Indonesia adalah negara yang masih tergolong negara berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian. Pemerintah Indonesia menyadari salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian adalah dengan cara melakukan pembangunan nasional agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak demi mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah diarahkan terutama pada pembangunan daerah, khususnya daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pembangunan daerah tentunya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas kebutuhan masing-masing daerah. Sasaran pembangunan nasional telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin (Dermoredjo, 2003).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik selama tahun 2015 sampai tahun 2019 perkembangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sudah menunjukkan adanya keberhasilan program pemerintah dalam

mengupayakan penurunan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan kemiskinan di Sumatera Barat terlihat pada Grafik 1.1 dibawah ini.

Grafik 1.1
Persentase Penduduk Miskin (%) di Sumatera Barat Tahun 2001 – 2021
Dalam Satuan (Persentase)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Grafik 1.1 terlihat terjadinya penurunan laju kemiskinan di Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2021, walaupun demikian antara data dengan realitas cenderung tidak sejalan, mengingat justru jika diamati secara langsung berdasarkan realitas jumlah kemiskinan diyakini akan lebih banyak, sehingga akan menciptakan berbagai masalah sosial seperti kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan. Jika terus dibiarkan tentu akan menciptakan gejolak dimasyarakat yang akan menciptakan situasi yang tidak kondusif, oleh sebab itu penting bagi

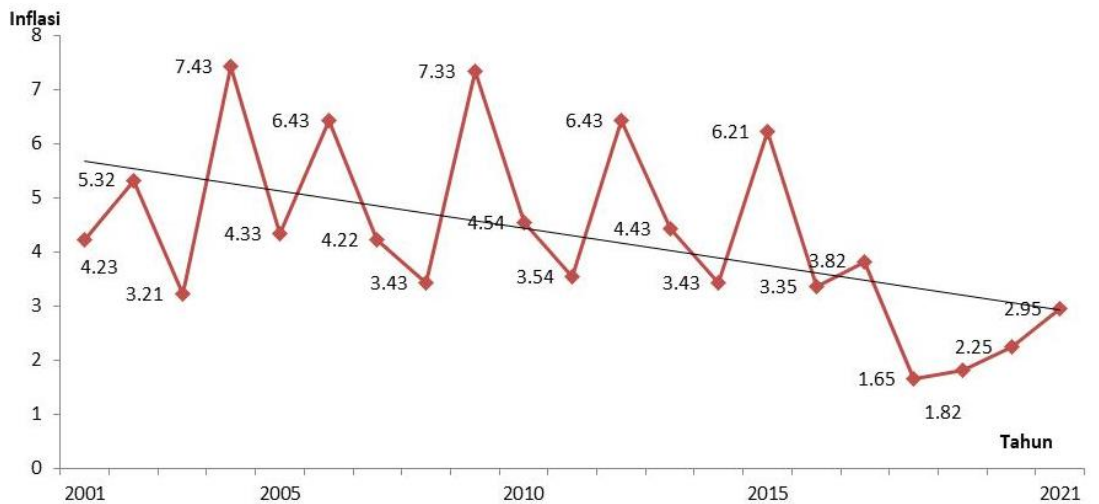
peneliti untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Barat

Meningkat atau menurunnya laju pertumbuhan kemiskinan khususnya di Sumatera Barat tentu tidak terbentuk dengan sendirinya akan tetapi dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya adalah inflasi, laju pengangguran dan indeks pembangunan manusia (Wulandari, 2015). Selain itu menurut Zuhdiyaty dan Kaluge (2018) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi laju kemiskinan di sejumlah daerah diantaranya adalah inflasi, laju pengangguran dan indeks pembangunan manusia.

Menurut Sukirno (2011) mengungkapkan inflasi sebagai kecenderungan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi secara signifikan. Terjadinya inflasi dipicu karena jumlah mata uang lokal yang beredar dimasyarakat terlalu tinggi, selain itu terjadinya inflasi juga mendorong menurunnya investasi atau pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah. Inflasi telah mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat atas sejumlah kebutuhan pokok dan menghambat terjadinya investasi. Ketika hal tersebut terjadi tentu akan mendorong meningkatnya kemiskinan di sejumlah daerah.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat terlihat perkembangan laju inflasi tahunan di Sumatera Barat dari 2010 sampai dengan 2021 yang laju, seperti terlihat pada Tabel 1.2 dibawah ini:

Grafik 1.2
Perkembangan Laju Inflasi (%) di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2021
Dalam Satuan Persentase



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pada Grafik 1.2 terlihat terjadi fluktuasi nilai nflasi p di Sumatera Barat pada relatif mengalami perubahan , dari data terlihat terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang masih memiliki tingkat inflasi yang tinggi, jika hal tersebut dibiarkan maka akan mengganggu mobilitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Ketika inflasi semakin tinggi dipastikan daya beli masyarakat akan menurun sehingga akan memicu meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu peneliti menduga bahwa perubahan inflasi akan mempengaruhi kemiskinan di Sumtera Barat.

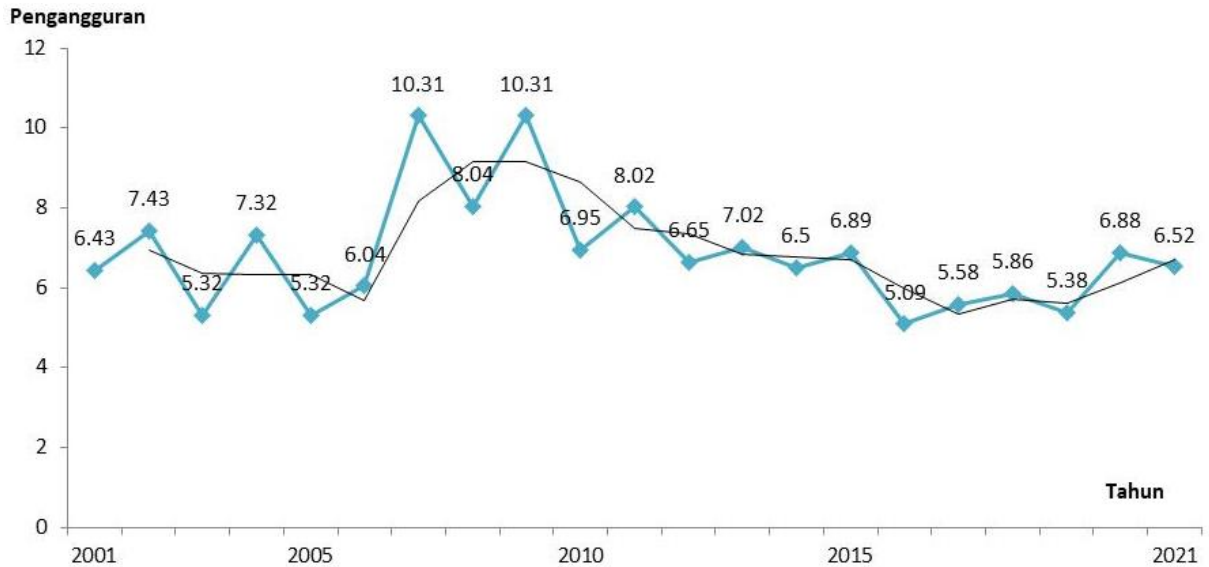
Hasil penelitian Wulandari (2015) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Rudy dan Indah (2020) menemukan semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi akan meningkatkan laju kemiskinan di sebuah daerah. Selanjutnya hasil penelitian Cokrowidagdo dan Badriyah (2017) menemukan semakin tinggi angka inflasi yang

terjadi pada sebuah daerah akan semakin meningkatkan laju kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Inflasi mendorong meningkatnya harga komoditas kebutuhan pokok, dan memicu menurunnya investasi sehingga mendorong meningkatnya kemiskinan.

Disamping inflasi, faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan adalah pengangguran. Menurut Eka Evrianti (2019) pengangguran menunjukkan sebuah kondisi dimana individu tersebut benar-benar tidak memiliki pekerjaan, ketika hal tersebut terjadi tentu individu tersebut tidak memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika hal tersebut terjadi menunjukkan individu tersebut dinyatakan miskin. Ketika laju pertumbuhan pengangguran semakin tinggi maka besar kemungkinan akan sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan kemiskinan di sebuah daerah.

Pengangguran merupakan fenomena sosial yang tentu tidak dapat dihindari atau dihilangkan, akan tetapi pengangguran dapat dikurangi melalui program program produktif dari pemerintah dan pengembangan konsep wirausaha. Pengangguran akan menciptakan penyakit masyarakat termasuk kemiskinan khususnya di Sumatera Barat Berdasarkan uraian data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat maka diperoleh perkembangan pengangguran terlihat pada Grafik 1.3 di bawah ini:

Grafik 1.3
Laju Pengangguran di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2021
Dalam Satuan Persentase



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

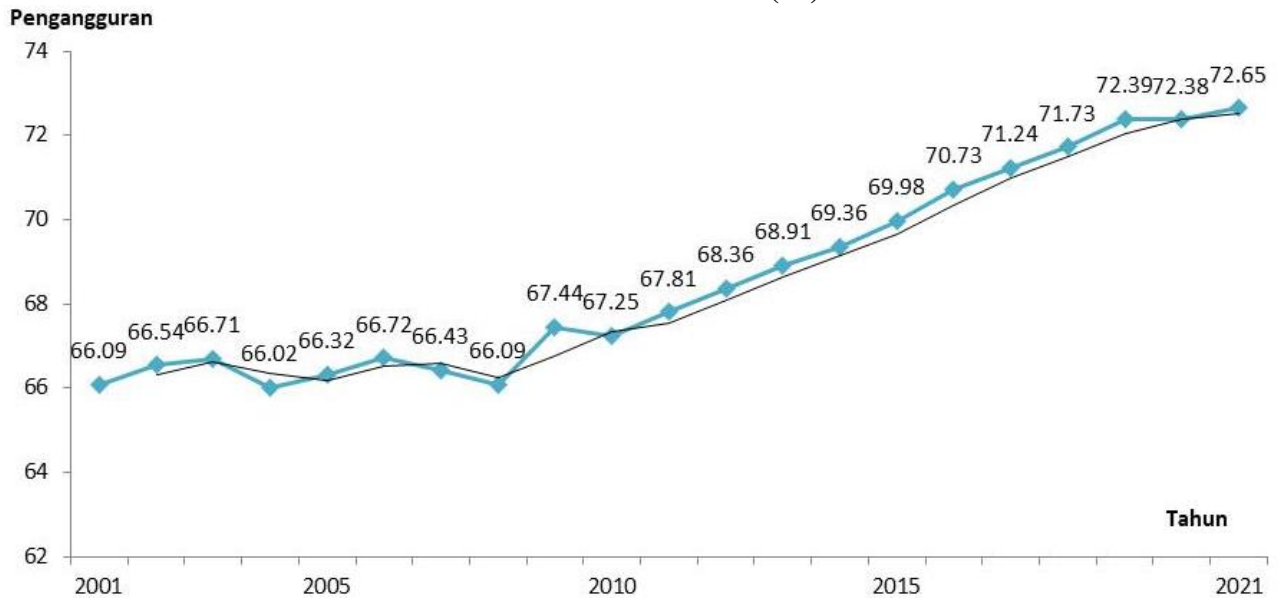
Berdasarkan Grafik 1.3 terlihat angka pengangguran tertinggi terjadi di tahun 2006 dan 2009, akan tetapi laju pengangguran dapat dikurangi pemerintah dengan mengembangkan sejumlah program yang produktif, seperti melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang arti penting wirausaha, serta giatnya pemerintah untuk memajukan investasi dan UMKM, walaupun demikian pengangguran tetap saja tidak dapat dihindari, dan tentunya akan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi terus meningkatnya laju kemiskinan di Sumatera Barat.

Hasil penelitian Swaramarinda (2014) menemukan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan semakin tinggi angka pengangguran akan semakin mendorong meningkatnya kemiskinan. Temuan yang sama juga diperoleh oleh Zuhdiyaty dan

Kaluge (2018) yang menemukan pengangguran yang semakin meningkat akan sejalan dengan meningkatnya angka kemiskinan. Temuan yang sama juga diperoleh Lendentariang (2019) yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di sebuah daerah. temuan tersebut juga mengisyaratkan semakin tinggi pengangguran akan meningkatkan angka kemiskinan di sebuah daerah.

Kemiskinan yang terjadi disebuah daerah cenderung berubah, mengngt banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Salah satu dari sekian banyak faktor tersebut adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks tersebut diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang atau hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh sebab itu semakin tinggi nilai IPM menunjukkan semakin tinggi kesejahteraan hidup masyarakat atau semakin menurunnya angka kemiskinan di sebuah daerah. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional diketahui perkembangan IPM di Sumatera Barat dari tahun 2001 sampai dengan 2021 terlihat di dalam Grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2001 – 2021 Dalam Satuan (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Grafik 1.4 terlihat nilai indeks IPM yang dimiliki sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat relatif berbeda-beda, hal tersebut menunjukkan masih terjadinya kesenjangan pembangunan di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Terjadinya kesenjangan pembangunan tentu tidak terlepas dari meningkatnya angka kemiskinan di sejumlah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mencoba meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemerataan pembangunan agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat terus mengalami kenaikan, yang tentunya akan menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

Hasil penelitian membahas pengaruh IPM terhadap kemiskinan telah dilakukan oleh Safuridar dan Putri (2019) menemukan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di sebuah daerah. Temuan yang sejalan juga diperoleh oleh Bandiyono (2018) yang menemukan ketika IPM menguat menunjukkan angka kemiskinan yang semakin menurun. Selanjutnya hasil penelitian Ningsih dan Syechalad (2016) yang juga mendukung hasil peneliti sebelumnya yang menemukan bahwa penguatan IPM akan menunjukkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan atau semakin menurunnya angka kemiskinan di sebuah daerah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dengan terjadinya fenomena-fenomena ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, khususnya menyangkut pertumbuhan ekonomi yang tidak lepas dari kemiskinan, begitu pula dengan ketimpangan pendapatan, pengangguran dan indeks pembangunan manusia, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Pengaruh Inflasi, Laju Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh laju pnangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?

3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh laju pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta .

2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut masalah kemiskinan.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.